

Tekan Kecurangan Pemuda Dilibatkan

SENANG dan bangga. Begitu-lah pernyataan sejumlah pemuda yang direkrut Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, untuk terlibat dalam pengawasan Pilkada 2020.

Pekan lalu, selama 5 hari, mereka mengikuti Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif. "Jumlahnya 90 pemuda. Pelatihan ini merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah terkait pemberdayaan masyarakat dalam pemilu," papar Komisioner Bawaslu Kabupaten Cirebon Rahmat Hidayat, kemarin.

Setelah pelatihan, para pemuda akan bertugas melakukan pengawasan selama proses Pilkada 2020 berlangsung. Dengan kemampuan yang didapat dalam pelatihan, mereka diharapkan bisa mendorong pengawasan partisipatif warga di daerah masing-masing.

Tujuan utama sekolah ini, lanjut Rahmat, ialah membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pesta demokrasi. "Kami juga berharap program ini dapat berkelanjutan dan menjadi model pengawasan pemilu partisipatif di masa mendatang."

Sekolah Kader memberi bekal para pemuda dari soal sistem politik, pembangunan karakter, hingga pengawasan pemilu di Indonesia.

Sementara itu, di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Daerah mengintensifkan sosialisasi Pilkada 2020 ke sekolah-sekolah. KPU menargetkan adanya peningkatan jumlah pemilih di kalangan milenial.

"Kami terus melaksanakan program KPU Visit ke sekolah-sekolah. Salah satu fokus sosialisasi KPU ialah menjangkau pemilih pemula," ungkap Komisioner KPU Kebumen Agus Hasan Hidayat.

Menurut dia, sosialisasi yang dilaksanakan KPU bertujuan meningkatkan partisipasi, khususnya di kalangan pemilih pemula. "Sosialisasi kepada pemilih dilakukan dengan cara interaktif sehingga mereka akan lebih paham dan dapat menekan angka golput di kalangan pemilih pemula," ujar Agus.

Di sejumlah daerah, Bawaslu memastikan politik uang masih akan mewarnai Pilkada 2020. Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, potensi kerawanan itu diprediksi masih terjadi. "Bentuknya beragam. Ada uang tunai, ada juga pembagian paket sembako. Bawaslu sulit bergerak sendiri sehingga membutuhkan peran masyarakat untuk melakukan pengawasan sehingga kecurangan bisa ditekan," tandas Ketua Bawaslu Dodi Juanda. (UL/LD/AU/JL/RS/SS/LD/PO/RF/AD/AP/N-3)



ANTARA/IRWANSAH PUTRA

FESTIVAL PANEN KOPI GAYO: Warga memetik kopi arabika saat perayaan panen massal dalam rangkaian Festival Panen Kopi 2019 di Bener Meriah, Aceh, kemarin. Masa panen kopi di dataran tinggi Gayo yang dimulai pada awal Oktober hingga akhir Februari itu telah menjadi agenda tahunan dan daya tarik kunjungan wisatawan.

Bronjong Timor Leste Rugikan Indonesia

Batas negara Indonesia dengan Timor Leste bergeser. Indonesia merugi karena kehilangan lahan dalam jumlah besar.

PALCE AMALO
palce@mediaindonesia.com

KEKHAWATIRAN dirasakan Michael Riwo Kaho, Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Nusa Tenggara Timur itu menemukan fakta perbatasan Indonesia-Timor Leste telah bergeser.

"Bukan karena manusia, tetapi ini oleh alam. Pergeseran membuat Indonesia kehilangan lahan sekitar 4.000 hektare," ungkap pengajar di Universitas Nusa Cendana, Kupang itu.

Persoalan perbatasan di Indonesia memang tidak selesai dengan membangun pos lintas batas negara yang indah. Sebelumnya, pergeseran tapal batas sering dilaporkan terjadi di Kalimantan, yang berbatasan dengan negeri jiran, Malaysia.

Berbeda dengan di Ka-

limantan, Michael Riwo menemukan pergeseran tapal batas dengan Timor Leste terjadi di Sungai Malibaka, perbatasan antara Kabupaten Belu dengan Distrik Bobonaro, Timor Leste. Kehilangan lahan terjadi sejak 2000 dan masih berlangsung sampai saat ini.

Di wilayah ini, tapal batas ditetapkan di bagian sungai yang terdalam. Dasi tahun ke tahun, sungai itu mengalami pelebaran karena faktor alam.

"Timor Leste membangun bronjong di tepi Sungai Malibaka dalam wilayah mereka. Pelebaran sungai pun terjadi ke wilayah Indonesia," lanjut Michael dalam sebuah *workshop* di Kupang, akhir pekan lalu.

Dia mengaku persoalan ini direspons maksimal oleh pemerintah. Padahal, kejadian serupa juga ditemukan di

perbatasan RI-Timor Leste di Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, yang berbatasan dengan Distrik Oekusi.

Sungai Malibaka juga berisiko menimbulkan friksi antarkecamatan negara. Pasalnya, hulu sungai itu ada di Timor Leste, mengalir ke Indonesia dan kembali ke Timor Leste. Pemerintah negeri tetangga itu meminta Indonesia membayar jasa lingkungan dengan ancaman akan menutup aliran air ke wilayah Kabupaten Belu.

Perbatasan Filipina

Pengamanan wilayah perbatasan juga menjadi prioritas bagi Polda Papua Barat. Wilayah tugas mereka berbatasan dengan Filipina.

Untuk memperkuat kemampuan mengamankan daerah terluar ini, Wakil Kepala Polda Papua Barat Komisaris Besar Tatang mengaku pihaknya sudah mengusulkan kenaikan status polda dari tipe B menjadi tipe A. "Sudah beberapa bulan lalu kami sampaikan kepada Mabes Polri."

Dia mengaku, dengan tipe B, personel yang dimiliki Polda Papua Barat sangat terbatas. Dengan kenaikan menjadi tipe A, penambahan personel bisa dilakukan sehingga kemampuan mengamankan garis perbatasan lebih maksimal.

Perbatasan Indonesia-Filipina di Papua Barat berada di Pulau Fani, Distrik Ayau, Kabupaten Raja Ampat. Selain itu, secara geografis wilayah perairan Papua Barat sangat luas sehingga butuh kekuatan personel dan peralatan yang besar.

Akhir pekan lalu, Pangdam I/Bukit Barisan Mayor Jenderal MS Fadhilah menerima sekaligus melepas Satgas Pengamanan Operasi Terluar. Di wilayah ini, titik perbatasan berada di Pulau Berhala, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

"Operasi pengamanan pulau terluar tidak ringan. Prajurit TNI harus tetap menjalankan tugas ini dengan gembira dan senyum sehingga tugas akan menjadi ringan," ujar Fadhilah. (MS/AP/Ant/YH/N-2)

PULAU KE PULAU

Pemprov DIY Gelar Jogja Day di Jakarta

DEMI meningkatkan kunjungan wisata, perdagangan, dan investasi, Pemprov DI Yogyakarta menggelar Jogja Day 2019 di Hotel Mercure, Jakarta, akhir pekan lalu. Hajatan bersama itu digelar Dinas Pariwisata bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Koperasi dan UKM.

"Jogja Day merupakan salah satu strategi mempromosikan potensi unggulan DIY, terutama di sektor *trade, tourism, and investment* (TTI) kepada mitra luar negeri," ungkap Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Arief Hidayat.

Selain itu, lanjut dia, Pemprov juga menginformasikan potensi dan mendorong masuknya pelaku usaha dan investor untuk menanamkan modal dan melakukan aktivitas ekonomi di DIY. Ekonomi kreatif berbasis digital dan wisata berbasis budaya merupakan dua *leading sector* ekonomi DIY.

Jogja Day 2019 juga diisi dengan *mini exhibition* yang menampilkan beberapa produk unggulan DIY. Forum ini dihadiri pejabat ekonomi kedutaan besar negara sahabat, perwakilan organisasi internasional, kementerian, investor dan pelaku usaha. (AT/N-2)

Polres Ciamis Segel Penambangan Liar

PERUSAKAN lingkungan mendapat perhatian Polres Ciamis, Jawa Barat. Kemarin, mereka meringkus tiga cuak yang menggerakkan aksi penambangan liar di Dusun Sindangarsi, Desa Banjarharja, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran.

Penggalian liar galian kapur itu dilakukan dengan menggunakan alat berat, berupa lima ekskavator. "Mereka mengaku hasil penambangan itu dikirim ke sejumlah proyek di Pangandaran," ujar Wakil Kepala Polres Ciamis Komarisir Lalu Wira Sutriana.

la memastikan penambangan itu dilakukan secara ilegal karena sang pemilik tidak memiliki dokumen perizinan. Penangkapan yang disertai penyegelan lokasi tambang itu dilakukan polres karena memperhitungkan dampak buruknya terhadap lingkungan. "Ciamis rawan longsor di musim penghujan. Karena itu, kami sempat menjajagi lingkungan," tambah Lalu.

Ketua Walhi Jawa Barat Dedi Kurniawan mengaku mendukung keputusan Polres Ciamis menutup tambang ilegal. (AD/N-2)

Perkebunan Nusantara

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) mengundang Penyedia Barang untuk mengikuti Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Sistem Gagar 1 Tahap (1 Sampul) sebanyak 4 (empat) paket Pekerjaan Pengadaan Bersama Pupuk Tunggal Semester 1 Tahun 2020 dengan sumber dana RKAP Tahun 2020 untuk kebutuhan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Anak Perusahaan PTPN sebagaimana tersebut dibawah, yaitu :

No	No Pengumuman	Judul	Nilai HPS (Tnc PPN 10%) (Rp)
1.	PANITIA AD HOC/PENG/003/2020	Pengadaan Bersama Pupuk Tunggal Semester 1 Tahun 2020 Pupuk Dolomite Sebanyak 69.628.900 Kg. Kebutuhan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan anak perusahaan PTPN I, II, IV, V, dan VI	Rp.65.848.416.812,00
2.	PANITIA AD HOC/PENG/009/2020	Pengadaan Bersama Pupuk Tunggal Semester 1 Tahun 2020 Pupuk TSP Sebanyak 12.159.850 Kg. Kebutuhan PTPN VII, VIII, dan XII	Rp.74.787.830.945,00
3.	PANITIA AD HOC/PENG/010/2020	Pengadaan Bersama Pupuk Tunggal Semester 1 Tahun 2020 Pupuk MOP/KCL Sebanyak 19.044.550 Kg. Kebutuhan PTPN II dan V	Rp.113.911.946.215,00
4.	PANITIA AD HOC/PENG/011/2020	Pengadaan Bersama Pupuk Tunggal Semester 1 Tahun 2020 Pupuk MOP/KCL Sebanyak 12.843.300 Kg. Kebutuhan PTPN VII, VIII, IX, X, XI, dan XII	Rp.78.155.730.591,00

A. Persyaratan Peserta dan Tata Cara Registrasi

- Persyaratan Peserta dan tata cara registrasi dapat dilihat pada pengumuman di website www.holding-perkebunan.com
- Persyaratan lain diatur dalam Dokumen Pengadaan.

B. Jadwal Pendaftaran Pelelangan Umum dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

- Peserta yang dapat melakukan pendaftaran adalah peserta yang telah memiliki *user id* dan *password* serta telah menuliskan dokumen asli SSK atau SBK ke PTPN dimana Vendor terdaftar untuk dilakukan verifikasi. Pendaftaran dilakukan secara online melalui web site <http://eproc.holding-perkebunan.com> atau <http://eproc.ptpn3.id>
- Jadwal pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan yaitu :
Hari/Tanggal/Waktu : Senin, 25 November 2019 / Pukul 11:00 WIB s.d. Senin, 02 Desember 2019
(Batas akhir waktu pendaftaran dapat dilihat pada jadwal pengadaan yang tertuang pada Dokumen Pengadaan dan aplikasi eproc)
- Pengambilan Dokumen Pengadaan dilakukan dengan cara mengunduh (*download*) pada aplikasi eproc. Untuk informasi terkait dengan Registrasi dan Pendaftaran dapat menghubungi panitia melalui email: panitia.pupuk@holding-perkebunan.com

Jakarta, 25 November 2019
Panitia Ad Hoc
Pengadaan Pupuk Bersama Tahun 2020
TTD
Ketua

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Jakarta Gedung Agro Plaza Lantai 15
Jl. H. R. Rasuna Said Kav X2-1, Jakarta 12950
telp : +62 21 29183300, fax : +62 21 5203030
email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Medan
Jl. Sei Batanghari No.2, Medan, 20122
telp : +62 61 8452244, fax : +62 61 8455177
email : cs@mail.ptpn3.co.id

INDOKORDSA

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT INDO KORDSA TBK ("Perseroan")**

TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM PERSEROAN TAHUN 2019

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 21 November 2019, telah memutuskan dan menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku 2019, sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per saham ("Dividen Interim") kepada pemegang/pemilik saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim untuk tahun buku 2019 adalah sebagai berikut:

Jadwal

Pengumuman di Bursa	25 November 2019
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	29 November 2019
Ex dividen di pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	2 Desember 2019
Daftar Pemegang Saham (Recording Date)	3 Desember 2019
Cum Dividen di Pasar Tunai	3 Desember 2019
Ex dividen di Pasar Tunai	4 Desember 2019
Pembayaran Dividen Interim	19 Desember 2019

Tata Cara Pembayaran Dividen Interim

- Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Desember 2019.
- Bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitikan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 19 Desember 2019. Bukti pembayaran Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang namanya tidak dimasukkan dalam penitikan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
- Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) PT EDI Indonesia Divisi Biro Administrasi Efek, Wisma SMR, 10th Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, telepon 650 5829 652 1010 Ext. 8230 paling lambat pada tanggal 6 Desember 2019 pada Pk. 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP. Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dipergilasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 6 Desember 2019 tanpa adanya dokumen dimaksud. Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi pemegang saham yang namanya dalam penitikan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warakat diambil di BAE mulai Maret 2020.
- Pengumuman terkait dengan pembagian Dividen Interim ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.4/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

Citeureup – Bogor, 25 November 2019
Direksi Perseroan

IBF
PT Intan Baruprana Finance Tbk

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk.**

Direksi PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 17 Desember 2019
Tempat : Auditorium Lantai 5, INTA HQ Building, Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5 Jakarta Utara
Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai

Mata Acara Rapat:

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
- Perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar tentang Tempat Kedudukan Perseroan;
- Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan, serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka Penyesuaian POJK No. 35 tahun 2018;

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- Penjelasan mengenai Mata Acara 1**
- Diperlukan persetujuan dari Rapat untuk perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Penjelasan mengenai Mata Acara 2**
- Diperlukan persetujuan dari Rapat untuk perubahan tempat kedudukan sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas
- Penjelasan mengenai Mata Acara 3**
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan saat ini dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Catatan:

- Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimi surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham;
- Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 November 2019 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham**");
- Bahan-bahan Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 dan dapat diperoleh pada jam kerja dengan permohonan tertulis dari pemegang saham serta dapat diakses melalui situs Web Perseroan dengan melakukan "*click*" pada www.ibf.co.id;
- Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, PT Admitra Jasa Korpora dengan alamat Plaza Property Lt. 2, Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII No.1, Perintis Kemerdekaan, Jakarta 13210, selambat-lambatnya tanggal 12 Desember 2019 pukul 16.00 WIB;

- Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
- Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir beserta bukti pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 November 2019
PT Intan Baruprana Finance Tbk
Direksi

Metro TV dan Brimob Gelar Operasi Katarak Gratis

STASIUN televisi *Metro TV* dan Korps Brigade Mobil (Brimob) Sumatra Utara (Sumut) menggelar operasi katarak secara gratis untuk masyarakat miskin.

Operasi dilaksanakan di RSU Universitas Sumatera Utara (USU) Padangbulan, Medan, Sumatra Utara, pada Sabtu (23/11). Kegiatan itu diadakan dalam rangka memperingati HUT ke-19 *Metro TV* dan HUT ke-74 Brimob.

Sebanyak tujuh dokter spesialis mata dari RSU USU dan RSU Bhayangkara dikerahkan. Para pasien umumnya dari kalangan lanjut usia dari berbagai wilayah di Medan, Kabupaten Deliserdang, dan Kabupaten Langkat.

Sofyan Tjiwi, koordinator acara bakti sosial operasi katarak yang merupakan bagian dari *corporate social responsibility* (CSR), mengatakan kegiatan itu merupakan wujud dari kepedulian Brimob dan *Metro TV* yang sudah puluhan tahun melayani masyarakat di Sumut.

Selain itu, kata Sofyan, para pasien juga mendapat kacamata dan pemeriksaan kesehatan secara gratis yang disponsori salah satu kafe di Medan.

Di kesempatan sama, Komandan Satuan Brimob Polda Sumut, Komisaris Besar Abu Bakar Tertusi, mengatakan kegiatan itu merupakan acara rutin tahunan yang men-

jadi instruksi Markas Besar Polri berkaitan HUT ke-74 Brimob.

"Kita akan selenggarakan setiap tahun. Hari ini sudah sekitar 90 pasien yang kita operasi. Tahun depan, mungkin jumlah peserta bisa bertambah dan pelayanan untuk masyarakat juga akan ditingkatkan," ujar Abu Bakar.

Terkait pelaksanaan operasi katarak, Presiden Direktur *Metro TV* Suryoprato mengucapakan terima kasih kepada RSU USU dan RSU Bhayangkara Polda Sumut yang telah menyediakan dokter dan tim medis guna membantu warga kurang mampu dalam melaksanakan operasi katarak tersebut. (PS/N-3)



MI/PUJI SANTOSO

METRO TV GELAR OPERASI KATARAK GRATIS: Warga tengah diperiksa matanya oleh tim medis saat diselenggarakannya bakti sosial operasi katarak gratis untuk masyarakat miskin di RSU Universitas Sumatera Utara (USU) Padangbulan, Medan, Sumut, Sabtu (23/11). Kegiatan bakti sosial ini diselenggarakan dalam rangka HUT ke-19 *Metro TV* bekerja sama dengan Brimob.